



MODEL TATA KELOLA KOLABORATIF DEWAN KEBIJAKAN PANGAN UNTUK PENGEMBANGAN SISTEM PANGAN LOKAL: TINJAUAN LITERATUR SISTEMATIS

Fauzan Hidayat Fauzan^{1*}, Sandi Nurgadi²

¹Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jl. Imam Bonjol. 61, Menteng, 10310, Indonesia; email: fauzanhidayat@kemenkopangan.ac.id, ²Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, M.H. Thamrin No. 8, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10340; email: sandinurhadi@maritim.ac.id

*Correspondence

Received: 14-05-2025; Accepted: 10-06-2026; Published: 30-6-2026

Abstract: *Local food systems face increasingly complex governance challenges that require collaborative mechanisms capable of integrating multiple stakeholders. Although Food Policy Councils (FPCs) have been widely developed as collaborative governance forums, existing studies on their success factors, implementation challenges, and contributions to local food system development remain fragmented and lack systematic integration. This study aims to examine the role of Food Policy Councils as collaborative governance mechanisms in local food system development through a Systematic Literature Review (SLR). The review followed the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) guidelines using articles indexed in the Scopus database. The literature search covered publications from 2015 to 2026 and identified 115 records. Following the screening process based on predefined inclusion and exclusion criteria, 30 articles published between 2018 and 2026 were selected for analysis. The findings indicate that Food Policy Councils represent the most dominant collaborative governance model for local food system development. Their effectiveness is influenced by stakeholder participation, leadership, trust, representation, institutional support, and network partnerships, while the main implementation challenges include cross-sectoral coordination, limited funding, power imbalances, and resource constraints. Furthermore, Food Policy Councils contribute to strengthening food security, food democracy, sustainable food systems, social equity, and community resilience. This study contributes to the collaborative governance literature by proposing an Integrated Food Policy Council Governance Framework, which integrates collaborative governance factors with local food system development outcomes into a comprehensive conceptual model for future research and more collaborative food policy development.*

Keywords: *Food Policy Council, collaborative governance, local food systems, food security, systematic literature review.*

Abstrak: Sistem pangan lokal menghadapi tantangan tata kelola yang semakin kompleks sehingga memerlukan mekanisme kolaborasi yang mampu mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan. Meskipun Dewan Kebijakan Pangan (Food Policy Council/FPC) telah banyak dikembangkan sebagai forum tata kelola kolaboratif, hasil-hasil penelitian mengenai faktor keberhasilan, tantangan implementasi, dan kontribusinya terhadap pengembangan sistem pangan lokal masih tersebar dan belum terintegrasi secara sistematis. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Dewan Kebijakan Pangan sebagai mekanisme tata kelola kolaboratif dalam pengembangan sistem pangan lokal melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Penelitian mengikuti pedoman Preferred Reporting

Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) dengan menggunakan artikel ilmiah yang terindeks pada basis data Scopus. Penelusuran literatur dilakukan terhadap publikasi periode 2015–2026 dan menghasilkan 115 artikel. Setelah melalui proses seleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, diperoleh 30 artikel yang dipublikasikan pada periode 2018–2026 untuk dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Kebijakan Pangan merupakan model tata kelola kolaboratif yang paling dominan dalam pengembangan sistem pangan lokal. Efektivitasnya dipengaruhi oleh partisipasi pemangku kepentingan, kepemimpinan, kepercayaan, representasi, dukungan kelembagaan, dan kemitraan jaringan, sedangkan tantangan utama meliputi koordinasi lintas sektor, keterbatasan pendanaan, ketimpangan kekuasaan, dan keterbatasan sumber daya. Selain itu, Dewan Kebijakan Pangan berkontribusi terhadap peningkatan ketahanan pangan, demokrasi pangan, keberlanjutan sistem pangan, keadilan sosial, dan ketahanan komunitas. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur collaborative governance melalui usulan Integrated Food Policy Council Governance Framework yang mengintegrasikan faktor-faktor tata kelola kolaboratif dengan outcome pengembangan sistem pangan lokal sebagai model konseptual bagi penelitian lanjutan dan perumusan kebijakan pangan yang lebih kolaboratif.

Kata Kunci: Dewan Kebijakan Pangan, tata kelola kolaboratif, sistem pangan lokal, ketahanan pangan, tinjauan literatur sistematis.

I. Pendahuluan

Sistem pangan global menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat perubahan iklim, urbanisasi, degradasi lingkungan, ketimpangan akses pangan, serta meningkatnya kerentanan rantai pasok. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pangan tidak lagi dapat dipahami semata sebagai isu produksi dan distribusi, tetapi juga sebagai persoalan tata kelola yang membutuhkan koordinasi lintas sektor dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan (Shalom et al., 2025). Sejalan dengan berkembangnya *food systems approach*, efektivitas sistem pangan semakin ditentukan oleh kemampuan berbagai aktor untuk membangun koordinasi, partisipasi, dan pengambilan keputusan secara kolaboratif (Clark & Inwood, 2016).

Dalam konteks tersebut, pengembangan *local food systems* dipandang sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan ketahanan pangan, memperkuat ekonomi lokal, serta membangun sistem pangan yang lebih berkelanjutan. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai persoalan tata kelola, seperti fragmentasi kebijakan, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan terbatasnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan *collaborative governance* menjadi semakin relevan dalam menjelaskan bagaimana pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, petani, dan sektor swasta dapat bekerja sama dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pangan (Ansell & Gash, 2008; Emerson & Nabatchi, 2015)

Salah satu bentuk implementasi *collaborative governance* yang berkembang pesat adalah *Food Policy Council* (FPC), yaitu forum multipihak yang berfungsi mengoordinasikan kebijakan pangan pada tingkat lokal maupun regional. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa FPC berkontribusi terhadap peningkatan koordinasi lintas sektor, partisipasi masyarakat, ketahanan

pangan, *food democracy*, serta keberlanjutan sistem pangan (Ammons et al., 2021; Schiff et al., 2022; Schmidt Rivera et al., 2023).

Meskipun demikian, penelitian mengenai FPC masih menunjukkan beberapa keterbatasan. Sebagian besar penelitian menggunakan pendekatan studi kasus pada konteks geografis tertentu, seperti Amerika Serikat, Jerman, Italia, dan Australia, dengan fokus yang beragam, mulai dari *food democracy*, *food justice*, ketahanan pangan, hingga keberlanjutan sistem pangan (Ammons et al., 2021; Godrich, Doe, et al., 2025). Di sisi lain, kajian literatur yang telah dilakukan umumnya hanya memetakan perkembangan konsep atau karakteristik kelembagaan FPC tanpa mengintegrasikan secara sistematis hubungan antara model tata kelola, aktor yang terlibat, faktor keberhasilan, tantangan implementasi, dan *outcome* yang dihasilkan (Schiff et al., 2022). Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan pengetahuan mengenai bagaimana FPC bekerja sebagai mekanisme *collaborative governance* dalam pengembangan sistem pangan lokal.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penyusunan sintesis literatur yang mengintegrasikan berbagai temuan empiris mengenai Food Policy Council ke dalam satu kerangka analitis yang menjelaskan hubungan antara model tata kelola, aktor yang terlibat, faktor keberhasilan, tantangan implementasi, dan *outcome* pengembangan sistem pangan lokal. Berdasarkan sintesis tersebut, penelitian ini mengusulkan Integrated Food Policy Council Governance Framework sebagai model konseptual yang menjelaskan keterkaitan faktor-faktor *collaborative governance* dengan efektivitas pengembangan sistem pangan lokal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis peran Food Policy Council sebagai mekanisme *collaborative governance* dalam pengembangan sistem pangan lokal melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Secara khusus, penelitian ini berupaya mengidentifikasi model tata kelola yang berkembang, aktor yang terlibat, faktor-faktor keberhasilan, tantangan implementasi, serta *outcome* yang dihasilkan, sekaligus mengembangkan model konseptual yang dapat memperkaya literatur *collaborative governance* dan menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan pangan yang lebih kolaboratif.

II. Literature Review

2.1. Collaborative Governance in Food Systems

Persoalan pangan semakin dipahami sebagai isu tata kelola yang melibatkan berbagai aktor, kepentingan, dan sektor yang saling berinteraksi. Oleh karena itu, pendekatan *collaborative governance* banyak digunakan untuk menjelaskan bagaimana pemerintah dan aktor non-pemerintah bekerja sama dalam menyelesaikan persoalan publik yang kompleks. Collaborative governance menekankan proses pengambilan keputusan yang berbasis dialog, konsensus, dan keterlibatan multipihak (Ansell & Gash, 2008). Perspektif tersebut kemudian dikembangkan oleh

Emerson & Nabatchi (2015) yang menekankan pentingnya *principled engagement*, *shared motivation*, dan *capacity for joint action* sebagai fondasi keberhasilan kolaborasi. Dalam konteks sistem pangan, pendekatan ini menjadi semakin relevan karena tantangan pangan tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi secara mandiri dan memerlukan keterlibatan pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, pelaku usaha, serta komunitas lokal (Keegan et al., 2024; Lim, 2023; Mangnus et al., 2019; Shalom et al., 2025).

2.2. Food Policy Council as a Collaborative Governance Mechanism

Salah satu bentuk implementasi collaborative governance yang berkembang pesat dalam sistem pangan adalah *Food Policy Council (FPC)*. FPC merupakan forum multipihak yang berfungsi sebagai ruang koordinasi, advokasi, dan perumusan kebijakan pangan pada tingkat lokal maupun regional. Scoping review yang dilakukan oleh Schiff et al. (2022) menunjukkan bahwa Food Policy Council telah berkembang dari forum konsultatif menjadi institusi yang berperan aktif dalam pembangunan sistem pangan lokal. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa FPC berkontribusi terhadap penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan partisipasi masyarakat, serta integrasi kebijakan pangan yang sebelumnya tersebar di berbagai institusi (Bellante et al., 2022; Calancie et al., 2017; Godrich, Goodwin, et al., 2025; Prové et al., 2019).

Dalam perkembangannya, Food Policy Council tidak hanya dipandang sebagai instrumen koordinasi kebijakan, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong *food democracy*. Konsep ini menempatkan masyarakat sebagai aktor yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait produksi, distribusi, dan konsumsi pangan. Penelitian yang dilakukan oleh Prové et al. (2019) menunjukkan bahwa Food Policy Council mampu memperluas ruang partisipasi warga dalam tata kelola pangan lokal, sementara berbagai studi terbaru menemukan bahwa forum pangan multipihak berkontribusi terhadap peningkatan representasi kelompok masyarakat dalam proses penyusunan (Schiller-Merkens & Degens, 2024)an kebijakan pangan (Farnsworth, 2017; Fears et al., 2021; Godrich, Doe, et al., 2025; Steyaert et al., 2025; Thompson et al., 2020). Dengan demikian, keberhasilan Food Policy Council tidak hanya diukur dari kemampuan menghasilkan kebijakan, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan proses tata kelola yang inklusif dan partisipatif.

2.3. Local Food System Development

Literatur mengenai pengembangan sistem pangan lokal (*local food system development*) menunjukkan bahwa keberhasilan sistem pangan tidak lagi diukur semata-mata dari peningkatan produksi pangan. Sistem pangan lokal juga dituntut mampu meningkatkan ketahanan pangan, memperkuat ketahanan komunitas, mendorong keberlanjutan lingkungan, serta menciptakan keadilan sosial. Sadler et al. (2015) menunjukkan bahwa jaringan pangan lokal dapat menjadi

katalis perubahan kebijakan sekaligus memperkuat pembangunan ekonomi lokal, sedangkan Clark & Inwood (2016) menemukan bahwa penguatan distribusi pangan regional berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas adaptif sistem pangan. Selain itu, Ammons et al. (2021) menunjukkan bahwa jaringan pangan berbasis komunitas memiliki peran penting dalam menjaga akses pangan selama masa krisis, termasuk pada periode pandemi COVID-19 (Atoloye et al., 2023).

2.4. Research Gap and Review Questions

Meskipun penelitian mengenai Food Policy Council terus berkembang, literatur yang ada masih menunjukkan sejumlah keterbatasan. Sebagian besar penelitian berfokus pada studi kasus di wilayah tertentu atau hanya menyoroti aspek-aspek tertentu seperti partisipasi, food democracy, ketahanan pangan, atau keberlanjutan secara terpisah (Ammons et al., 2021; Prové et al., 2019; Schiff et al., 2022). Akibatnya, masih terbatas kajian yang secara sistematis mengintegrasikan model tata kelola, komposisi aktor, faktor keberhasilan, tantangan implementasi, dan outcome Food Policy Council dalam satu kerangka collaborative governance. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* untuk mensintesis berbagai temuan empiris dan mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran Food Policy Council dalam pengembangan sistem pangan lokal.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana Food Policy Council diposisikan dan diterapkan sebagai mekanisme collaborative governance dalam pengembangan sistem pangan lokal?
2. Faktor-faktor apa yang menentukan efektivitas implementasi Food Policy Council dalam pengembangan sistem pangan lokal?
3. Apa tantangan utama yang memengaruhi implementasi Food Policy Council sebagai mekanisme collaborative governance?
4. Apa saja outcome yang dihasilkan Food Policy Council terhadap pengembangan sistem pangan lokal?
5. Bagaimana hubungan antara faktor keberhasilan, tantangan implementasi, dan outcome dapat disintesis ke dalam Integrated Food Policy Council Governance Framework?

III. Research Methodologies

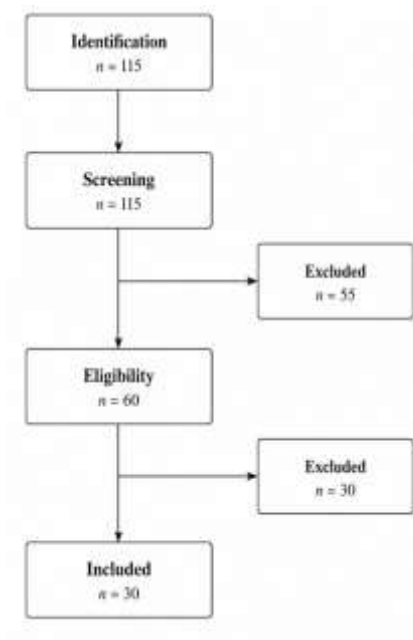
Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk menganalisis peran Food Policy Councils (FPCs) sebagai mekanisme collaborative governance dalam pengembangan sistem pangan lokal. Pendekatan SLR dipilih karena memungkinkan identifikasi, evaluasi, dan sintesis temuan penelitian secara sistematis sehingga menghasilkan pemahaman

yang lebih komprehensif mengenai perkembangan literatur pada suatu bidang kajian. Proses review mengikuti pedoman Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) yang banyak digunakan dalam penelitian berbasis sintesis literatur untuk meningkatkan transparansi dan replikasi penelitian (Page et al., 2021). Penggunaan SLR juga dinilai sesuai untuk mengidentifikasi pola tata kelola, bentuk kolaborasi, dan dinamika kelembagaan dalam studi sistem pangan yang berkembang secara multidisipliner (Andreola et al., 2026; Schiller-Merkens & Machin, 2023).

Data penelitian berasal dari artikel ilmiah yang terindeks dalam basis data Scopus. Basis data ini dipilih karena memiliki cakupan publikasi internasional yang luas dan banyak digunakan dalam penelitian systematic literature review. Penelusuran literatur dilakukan pada Juni 2026 menggunakan kata kunci utama "Food Policy Council" dengan formulasi pencarian TITLE-ABS-KEY ("food policy council") AND PUBYEAR > 2014, sehingga mencakup publikasi pada periode 2015–2026. Pencarian awal menghasilkan 115 artikel yang relevan dengan tema penelitian. Pemilihan Scopus didasarkan pada cakupan publikasi lintas disiplin yang relevan dengan kajian tata kelola pangan, partisipasi masyarakat, dan kebijakan publik (Zollinger & Owen, 2026).

Proses seleksi artikel dilakukan melalui empat tahapan PRISMA, yaitu *identification*, *screening*, *eligibility*, dan *inclusion*. Pada tahap identifikasi diperoleh 115 artikel dari hasil pencarian Scopus. Selanjutnya dilakukan penyaringan berdasarkan judul dan abstrak sehingga sebanyak 55 artikel dikeluarkan karena tidak relevan dengan tema *Food Policy Council*, *collaborative governance*, dan pengembangan sistem pangan lokal. Tahap *eligibility* dilakukan terhadap 60 artikel menggunakan kriteria inklusi, eksklusi, dan *quality assessment*. Hasil seleksi menunjukkan bahwa 30 artikel memenuhi seluruh kriteria untuk dianalisis. Meskipun penelusuran literatur mencakup publikasi periode 2015–2026, seluruh artikel yang lolos seleksi dan memenuhi standar kualitas penelitian dipublikasikan pada periode 2018–2026. Artikel yang terbit pada periode 2015–2017 tidak dimasukkan ke dalam analisis karena tidak memenuhi kriteria inklusi dan *quality assessment*, terutama terkait relevansi terhadap fokus penelitian dan kelengkapan pembahasan mengenai *Food Policy Council* sebagai mekanisme *collaborative governance*. ~~untuk menghilangkan artikel yang tidak relevan dengan tema tata kelola pangan, collaborative governance, dan pengembangan sistem pangan lokal. Sebanyak 55 artikel dikeluarkan pada tahap ini. Tahap berikutnya adalah penilaian kelayakan (eligibility) terhadap 60 artikel yang tersisa dengan menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Hasil proses tersebut menghasilkan 30 artikel yang memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut. Ringkasan proses seleksi artikel berdasarkan pedoman PRISMA disajikan pada Gambar 1.~~

Gambar 1. PRISMA Flow Diagram



Gambar 1 menunjukkan bahwa dari 115 artikel yang teridentifikasi pada tahap awal, hanya 30 artikel yang memenuhi seluruh kriteria inklusi dan kualitas penelitian yang ditetapkan. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa artikel yang dianalisis memiliki relevansi yang tinggi terhadap tema Food Policy Council, collaborative governance, dan pengembangan sistem pangan lokal.

Tabel 2: Distribusi Artikel Berdasarkan Tahun Publikasi

<i>Tahun</i>	<i>Artikel Final</i>
2018	2
2019	3
2020	4
2021	5
2022	6
2023	4
2024	3
2025	2
2026	1

Berdasarkan tabel distribusi artikel di atas, proses penelusuran literatur dilakukan terhadap publikasi yang terbit pada periode 2015–2026 sesuai dengan strategi pencarian menggunakan query PUBYEAR > 2014. Strategi tersebut menghasilkan 115 artikel yang selanjutnya melalui

tahapan screening, eligibility, dan quality assessment sesuai pedoman PRISMA. Setelah proses seleksi, sebanyak 30 artikel dinyatakan memenuhi seluruh kriteria inklusi dan digunakan dalam analisis.

Meskipun rentang pencarian mencakup publikasi tahun 2015–2026, seluruh artikel yang memenuhi kriteria akhir dipublikasikan pada periode 2018–2026. Tidak terdapat artikel yang diterbitkan pada periode 2015–2017 yang memenuhi seluruh kriteria inklusi dan quality assessment. Sebagian artikel pada periode tersebut dieliminasi karena tidak membahas Food Policy Council sebagai mekanisme collaborative governance secara eksplisit, tidak memiliki fokus pada pengembangan sistem pangan lokal, atau belum menyajikan temuan empiris yang memadai untuk proses sintesis. Temuan ini menunjukkan bahwa publikasi mengenai Food Policy Council dalam perspektif collaborative governance mulai berkembang secara lebih konsisten sejak tahun 2018, yang tercermin dari seluruh artikel yang lolos seleksi akhir berasal dari periode tersebut.

Kriteria inklusi yang digunakan meliputi: (1) artikel dipublikasikan pada periode 2015–2026; (2) merupakan artikel jurnal yang telah melalui proses *peer-review*; (3) ditulis dalam bahasa Inggris; (4) membahas *Food Policy Council* atau mekanisme tata kelola pangan yang relevan; dan (5) memuat aspek tata kelola, kolaborasi, partisipasi pemangku kepentingan, atau pengembangan sistem pangan lokal. Sebaliknya, artikel yang berfokus pada nutrisi klinis, teknologi pangan, kimia pangan, atau tidak memiliki dimensi tata kelola dikeluarkan dari analisis. Penetapan kriteria tersebut dilakukan untuk menjaga kesesuaian artikel dengan fokus penelitian pada tata kelola dan kolaborasi dalam sistem pangan lokal (Godrich, Doe, et al., 2025).

Untuk meningkatkan kualitas sintesis, setiap artikel yang lolos seleksi dievaluasi menggunakan *quality assessment*. Penilaian dilakukan berdasarkan tiga aspek utama, yaitu: (1) relevansi terhadap tema Food Policy Council; (2) keberadaan pembahasan mengenai tata kelola atau kolaborasi; dan (3) kejelasan temuan empiris yang dapat digunakan dalam proses sintesis. Hanya artikel yang memenuhi seluruh aspek tersebut yang dimasukkan ke dalam analisis akhir. Data dari artikel terpilih kemudian diekstraksi menggunakan lembar coding yang mencakup informasi mengenai tahun publikasi, lokasi penelitian, model tata kelola, aktor yang terlibat, faktor keberhasilan, tantangan implementasi, dan outcome yang dihasilkan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan pendekatan thematic analysis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antarvariabel yang muncul dalam literatur. Hasil analisis digunakan untuk menyusun sintesis konseptual mengenai peran Food Policy Council sebagai mekanisme *collaborative governance* dalam pengembangan sistem pangan lokal serta untuk mengembangkan *Integrated Food Policy Council Governance Framework* yang diusulkan dalam penelitian ini.

IV. Result and Discussion

Berdasarkan hasil penelusuran literatur pada basis data Scopus menggunakan kata kunci Food Policy Council, diperoleh 115 artikel pada tahap identifikasi. Setelah melalui proses penyaringan sesuai pedoman PRISMA, sebanyak 30 artikel memenuhi kriteria inklusi dan dianalisis lebih lanjut. Artikel yang dipilih dipublikasikan pada periode 2018–2026 dan berasal dari berbagai negara, dengan dominasi penelitian dari Amerika Serikat, Jerman, Italia, Australia, dan beberapa studi lintas negara.

Tabel 3. Karakteristik Studi yang Direview

<i>Karakteristik</i>	<i>Hasil</i>
<i>Database</i>	Scopus
<i>Artikel Awal</i>	115
<i>Artikel Final</i>	30
<i>Rentang Tahun</i>	2018–2026
<i>Negara Dominan</i>	Amerika Serikat
<i>Metode Dominan</i>	Studi Kasus Kualitatif
<i>Fokus Dominan</i>	Food Policy Council dan Food Governance

Sebagian besar penelitian menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif untuk memahami proses kolaborasi, dinamika kelembagaan, dan interaksi antarpemangku kepentingan dalam Food Policy Council. Temuan ini menunjukkan bahwa literatur mengenai Food Policy Council masih berfokus pada eksplorasi proses dan mekanisme tata kelola dibandingkan pengukuran dampak secara kuantitatif. Di sisi lain, dominasi penelitian dari negara-negara maju menunjukkan bahwa kajian mengenai Food Policy Council di negara berkembang masih relatif terbatas, sehingga membuka peluang penelitian lebih lanjut dalam konteks tata kelola pangan di negara-negara Global South.

a. Food Policy Council sebagai Mekanisme Collaborative Governance

Hasil sintesis menunjukkan bahwa Food Policy Council merupakan model tata kelola kolaboratif yang paling dominan dalam literatur yang direview. Forum ini berfungsi sebagai wadah yang mempertemukan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, petani, akademisi, sektor swasta, dan komunitas lokal dalam proses perumusan kebijakan pangan.

Tabel 4. Distribusi Model Tata Kelola

<i>Model Tata Kelola</i>	<i>Frekuensi</i>
<i>Food Policy Council</i>	15
<i>Food Partnership/Network</i>	4
<i>Collaborative Governance</i>	2
<i>Food Governance</i>	2
<i>Community Food Governance</i>	1
<i>Food Roundtable</i>	1
<i>Lainnya</i>	5

Temuan ini menunjukkan bahwa Food Policy Council telah berkembang menjadi bentuk kelembagaan yang paling banyak digunakan dalam tata kelola sistem pangan lokal. Berbeda dengan pendekatan birokratis konvensional, FPC menekankan proses deliberatif, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi multipihak dalam pengambilan keputusan.

Temuan tersebut mendukung teori collaborative governance yang dikembangkan oleh Ansell & Gash (2008), yang menempatkan dialog, partisipasi, dan pencapaian konsensus sebagai elemen utama tata kelola kolaboratif. Namun demikian, hasil sintesis menunjukkan bahwa keberadaan forum kolaboratif saja tidak cukup menjamin keberhasilan tata kelola. Beberapa studi menunjukkan bahwa efektivitas Food Policy Council lebih ditentukan oleh kualitas hubungan antaraktor dibandingkan desain kelembagaan formal semata. Dengan demikian, Food Policy Council dapat dipahami bukan hanya sebagai struktur organisasi, tetapi juga sebagai arena interaksi sosial yang menghasilkan kapasitas kolektif dalam menyelesaikan persoalan pangan.

Menariknya, hasil sintesis menunjukkan bahwa model Food Policy Council tidak diterapkan secara seragam pada seluruh konteks kelembagaan. Studi-studi yang berasal dari Amerika Serikat, Kanada, dan beberapa negara Eropa umumnya menggambarkan Food Policy Council sebagai forum kolaboratif yang memperoleh dukungan formal dari pemerintah daerah sehingga memiliki legitimasi kelembagaan yang relatif kuat. Sebaliknya, beberapa studi pada konteks berbasis komunitas menunjukkan bahwa Food Policy Council lebih berkembang melalui inisiatif masyarakat sipil dan organisasi lokal. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas Food Policy Council tidak hanya dipengaruhi oleh bentuk kelembagaannya, tetapi juga oleh kapasitas masing-masing konteks institusional dalam memfasilitasi kolaborasi lintas sektor.

b. Faktor Keberhasilan Implementasi Food Policy Council

Analisis tematik menghasilkan enam faktor utama yang berkontribusi terhadap efektivitas Food Policy Council.

Tabel 5. Faktor Keberhasilan Food Policy Council

<i>Faktor</i>	<i>Frekuensi</i>
<i>Partisipasi</i>	7
<i>Dukungan Kelembagaan</i>	6
<i>Kepemimpinan</i>	5
<i>Representasi</i>	5
<i>Kemitraan Jaringan</i>	5
<i>Kepercayaan</i>	4

Partisipasi pemangku kepentingan merupakan faktor yang paling sering ditemukan dalam literatur. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan Food Policy Council sangat bergantung pada kemampuan melibatkan berbagai aktor dalam proses perumusan agenda, pengambilan keputusan, dan implementasi kebijakan. Partisipasi tidak hanya menciptakan legitimasi, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki terhadap program yang dihasilkan.

Selain partisipasi, kepemimpinan muncul sebagai faktor penting dalam menjaga keberlangsungan kolaborasi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemimpin yang mampu membangun visi bersama dan menjembatani perbedaan kepentingan memiliki peran sentral dalam menjaga efektivitas Food Policy Council. Temuan ini memperkuat pandangan Emerson dan Nabatchi (2015) bahwa kapasitas kolaboratif tidak dapat dipisahkan dari keberadaan aktor yang mampu memfasilitasi kerja sama.

Kepercayaan dan dukungan kelembagaan juga menjadi faktor penting. Menariknya, sejumlah studi menunjukkan bahwa kepercayaan sering kali berkembang melalui interaksi yang berulang dan keberhasilan kolaborasi sebelumnya. Dengan kata lain, kepercayaan tidak hanya menjadi prasyarat kolaborasi, tetapi juga merupakan hasil dari proses kolaborasi itu sendiri. Sementara itu, dukungan kelembagaan memberikan legitimasi, sumber daya, dan stabilitas yang diperlukan untuk mempertahankan keberlanjutan *Food Policy Council*.

Hasil sintesis juga menunjukkan adanya hubungan yang erat antara dukungan kelembagaan, kepemimpinan, dan keberlanjutan Food Policy Council. Berbagai studi memperlihatkan bahwa dukungan kelembagaan menyediakan legitimasi, sumber daya, dan stabilitas organisasi yang memungkinkan proses kolaborasi berlangsung secara berkelanjutan. Dalam kondisi tersebut, kepemimpinan kolaboratif berfungsi mengonsolidasikan partisipasi dan membangun kepercayaan antarpemangku kepentingan. Dengan demikian, efektivitas Food Policy Council tidak bergantung pada satu faktor tunggal, melainkan pada interaksi antara kapasitas kelembagaan dan dinamika sosial dalam forum kolaboratif.

c. Tantangan Implementasi Food Policy Council

Meskipun menawarkan berbagai manfaat, Food Policy Council juga menghadapi sejumlah

tantangan yang dapat mengurangi efektivitas tata kelola.

Tabel 6. Tantangan Implementasi Food Policy Council

<i>Tantangan</i>	<i>Frekuensi</i>
<i>Koordinasi</i>	12
<i>Pendanaan</i>	5
<i>Ketimpangan Kekuasaan</i>	5
<i>Keterbatasan Sumber Daya</i>	4
<i>Fragmentasi Kelembagaan</i>	1

Masalah koordinasi merupakan tantangan yang paling dominan dalam literatur. Keterlibatan banyak organisasi dengan tujuan dan prioritas yang berbeda sering kali menyebabkan kesulitan dalam menyelaraskan agenda bersama. Kondisi ini menunjukkan bahwa kolaborasi bukan sekadar mempertemukan aktor dalam satu forum, melainkan juga membutuhkan mekanisme untuk mengelola perbedaan kepentingan.

Tantangan lain yang cukup signifikan adalah keterbatasan pendanaan dan sumber daya. Banyak Food Policy Council bergantung pada hibah proyek atau kontribusi sukarela sehingga menghadapi kesulitan dalam mempertahankan program jangka panjang. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan kolaborasi tidak hanya dipengaruhi oleh komitmen aktor, tetapi juga oleh kapasitas organisasi untuk memperoleh dan mengelola sumber daya.

Selain itu, ketimpangan kekuasaan masih menjadi isu yang sering muncul dalam berbagai studi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa organisasi yang memiliki sumber daya lebih besar cenderung memiliki pengaruh yang lebih dominan dalam proses pengambilan keputusan. Temuan ini memperkuat kritik terhadap collaborative governance yang menyatakan bahwa forum kolaboratif tidak selalu menghasilkan distribusi kekuasaan yang setara.

Analisis lintas studi menunjukkan bahwa tantangan koordinasi lebih sering muncul pada Food Policy Council yang melibatkan banyak organisasi dengan kewenangan formal yang berbeda, khususnya pada model yang memperoleh dukungan pemerintah daerah. Sebaliknya, Food Policy Council berbasis komunitas cenderung menghadapi tantangan yang lebih berkaitan dengan keterbatasan sumber daya dan pendanaan dibandingkan kompleksitas koordinasi birokrasi. Temuan ini menunjukkan bahwa karakteristik kelembagaan memengaruhi jenis tantangan yang dihadapi oleh Food Policy Council.

d. Outcome Food Policy Council terhadap Pengembangan Sistem Pangan Lokal

Hasil sintesis menunjukkan bahwa Food Policy Council menghasilkan berbagai outcome yang berkontribusi terhadap pengembangan sistem pangan lokal.

Tabel 7. Outcome Food Policy Council

<i>Outcome</i>	<i>Frekuensi</i>
<i>Ketahanan Pangan</i>	13
<i>Demokrasi Pangan</i>	7
<i>Keberlanjutan</i>	6
<i>Keadilan Sosial</i>	4
<i>Ketahanan Komunitas</i>	2

Ketahanan pangan merupakan outcome yang paling dominan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa Food Policy Council berkontribusi terhadap peningkatan akses pangan, penguatan jaringan distribusi lokal, serta koordinasi kebijakan yang mendukung sistem pangan daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa kontribusi utama Food Policy Council tidak terletak pada peningkatan produksi pangan secara langsung, melainkan pada penguatan kapasitas tata kelola yang mendukung sistem pangan secara keseluruhan.

Selain ketahanan pangan, demokrasi pangan menjadi outcome penting yang banyak ditemukan dalam literatur. Melalui keterlibatan berbagai kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, Food Policy Council memperluas ruang partisipasi warga dalam tata kelola pangan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem pangan tidak hanya diukur dari ketersediaan pangan, tetapi juga dari kemampuan menciptakan proses pengambilan keputusan yang inklusif.

Outcome lain yang muncul adalah keberlanjutan, keadilan sosial, dan ketahanan komunitas. Menariknya, sebagian besar penelitian menempatkan Food Policy Council sebagai instrumen tata kelola yang memperkuat kapasitas adaptif masyarakat dalam menghadapi berbagai krisis dan perubahan lingkungan. Dengan demikian, Food Policy Council tidak hanya menghasilkan manfaat sektoral pada bidang pangan, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan sosial yang lebih luas.

Selain itu, hasil sintesis menunjukkan bahwa outcome yang dihasilkan Food Policy Council berkaitan erat dengan kombinasi faktor-faktor keberhasilan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Food Policy Council yang mampu membangun partisipasi luas, memperoleh dukungan kelembagaan, dan mempertahankan kemitraan lintas sektor cenderung menghasilkan outcome yang

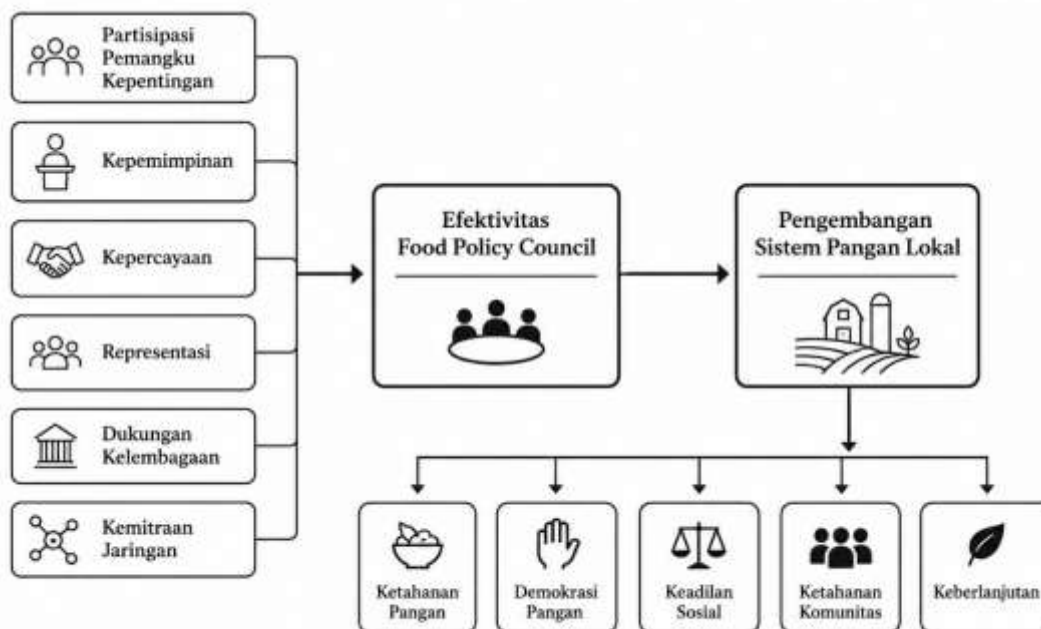
lebih beragam, tidak hanya berupa peningkatan ketahanan pangan tetapi juga demokrasi pangan, keberlanjutan, dan keadilan sosial. Sebaliknya, studi-studi yang melaporkan lemahnya koordinasi dan keterbatasan sumber daya umumnya menunjukkan capaian outcome yang lebih terbatas.

e. Hubungan antara faktor keberhasilan, tantangan implementasi, dan outcome terhadap Integrated Food Policy Council Governance Framework

Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa literatur terdahulu cenderung membahas Food Policy Council secara parsial. Sebagian penelitian berfokus pada partisipasi, sebagian lainnya pada food democracy, ketahanan pangan, atau keberlanjutan. Akibatnya, hubungan antara faktor-faktor tata kelola dan outcome yang dihasilkan belum banyak dibahas secara terintegrasi.

Model ini menunjukkan bahwa keberhasilan Food Policy Council tidak hanya ditentukan oleh keberadaan forum kolaboratif, tetapi juga oleh kualitas hubungan sosial dan dukungan kelembagaan yang menopang proses kolaborasi. Dengan demikian, penelitian ini memperluas literatur collaborative governance dengan menunjukkan bagaimana mekanisme tata kelola kolaboratif dapat menghasilkan berbagai outcome pembangunan melalui penguatan sistem pangan lokal.

Gambar 2. Integrated Food Policy Council Governance Framework



Hasil sintesis menunjukkan bahwa hubungan antara faktor-faktor collaborative governance bersifat saling memperkuat (mutually reinforcing), bukan berdiri sendiri. Partisipasi yang luas meningkatkan representasi dan legitimasi forum, sedangkan kepemimpinan kolaboratif berperan membangun kepercayaan antarpemangku kepentingan dan memfasilitasi koordinasi lintas sektor.

Kepercayaan yang terbentuk selanjutnya memperkuat kemitraan jaringan, sementara dukungan kelembagaan menyediakan legitimasi formal, sumber daya, dan stabilitas organisasi yang memungkinkan Food Policy Council mempertahankan kolaborasi dalam jangka panjang. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas Food Policy Council merupakan hasil interaksi antara faktor-faktor sosial dan kelembagaan, bukan ditentukan oleh satu faktor secara terpisah.

Selain menunjukkan keterkaitan antar faktor, sintesis lintas studi juga mengindikasikan adanya variasi implementasi berdasarkan konteks kelembagaan. Studi-studi dari negara maju umumnya menekankan pentingnya dukungan kelembagaan formal dan koordinasi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan Food Policy Council, sedangkan kajian dari negara berkembang masih relatif terbatas dan lebih banyak menyoroti tantangan kapasitas kelembagaan serta keterbatasan sumber daya. Berdasarkan sintesis tersebut, penelitian ini mengembangkan Integrated Food Policy Council Governance Framework yang menjelaskan bagaimana interaksi antara partisipasi, kepemimpinan, kepercayaan, representasi, dukungan kelembagaan, dan kemitraan jaringan menghasilkan berbagai outcome, seperti ketahanan pangan, demokrasi pangan, keberlanjutan, keadilan sosial, dan ketahanan komunitas. Dengan demikian, penelitian ini memperluas literatur collaborative governance melalui penyajian model konseptual yang mengintegrasikan hubungan antar faktor tata kelola dengan outcome pengembangan sistem pangan lokal.

V. Conclusion

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Food Policy Council (FPC) sebagai mekanisme collaborative governance dalam pengembangan sistem pangan lokal melalui pendekatan Systematic Literature Review. Hasil sintesis terhadap 30 artikel menunjukkan bahwa Food Policy Council merupakan model tata kelola kolaboratif yang paling dominan dalam literatur sistem pangan lokal. Efektivitasnya ditentukan oleh interaksi antara partisipasi pemangku kepentingan, kepemimpinan, kepercayaan, representasi, dukungan kelembagaan, dan kemitraan jaringan. Sebaliknya, tantangan utama yang dihadapi meliputi koordinasi lintas sektor, keterbatasan pendanaan, ketimpangan kekuasaan, dan keterbatasan sumber daya. Faktor-faktor tersebut secara bersama-sama memengaruhi kemampuan Food Policy Council dalam menghasilkan berbagai outcome, seperti ketahanan pangan, demokrasi pangan, keberlanjutan sistem pangan, keadilan sosial, dan ketahanan komunitas.

Kontribusi utama penelitian ini adalah penyusunan Integrated Food Policy Council Governance Framework, yang mengintegrasikan hubungan antara faktor-faktor collaborative governance dan outcome pengembangan sistem pangan lokal ke dalam satu kerangka konseptual. Model ini memperkaya literatur collaborative governance dengan menunjukkan bahwa efektivitas Food Policy Council merupakan hasil interaksi antara dimensi sosial dan kelembagaan, bukan ditentukan oleh

satu faktor secara terpisah. Dari sisi praktis, temuan penelitian memberikan implikasi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memperkuat dukungan kelembagaan, partisipasi, kepemimpinan kolaboratif, dan kemitraan lintas sektor sebagai prasyarat pengembangan sistem pangan lokal yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, sumber data hanya berasal dari artikel yang terindeks pada basis data Scopus sehingga belum mencakup publikasi dari basis data lain. Kedua, sebagian besar studi yang direview berasal dari negara maju sehingga generalisasi temuan pada konteks negara berkembang perlu dilakukan secara hati-hati. Ketiga, penelitian ini menggunakan pendekatan sintesis literatur sehingga hubungan antar faktor dalam model konseptual yang diusulkan belum diuji secara empiris.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji Integrated Food Policy Council Governance Framework melalui studi empiris dengan pendekatan kuantitatif, kualitatif, maupun mixed methods. Penelitian mendatang juga perlu memperluas cakupan literatur dengan memasukkan berbagai basis data ilmiah serta mengeksplorasi implementasi Food Policy Council di negara berkembang, termasuk Indonesia, guna memperoleh pemahaman yang lebih kontekstual mengenai tata kelola kolaboratif dalam pengembangan sistem pangan lokal.

VI. Daftar Pustaka

- Ammons, S., Blacklin, S., Bloom, D., Brown, S., Cappellazzi, M., Creamer, N., Cruz, A., Hynson, J., Knight, G., Lauffer, L., Liang, K., Menius, L., Piner, A., Smallwood, A., Stout, R., Stover, C., Thraves, T., & Ukah, B. (2021). A collaborative approach to COVID-19 response: The Center for Environmental Farming Systems community-based food system initiatives. *Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development*, *10*(2), 297–302. <https://doi.org/10.5304/jafscd.2021.102.004>
- Andreola, M., Forno, F., & Giovannini, M. (2026). Tracing democratic innovations: A longitudinal perspective on a food policy council. *Environment and Planning C: Politics and Space*, *44*(2), 213–235. <https://doi.org/10.1177/23996544251369249>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *18*(4), 543 – 571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Atoloye, A. T., Bassarab, K., Schouboe, S., Misiaszek, C., Harding, J., Calancie, L., & Cooksey Stowers, K. (2023). Developing a food system indicators database to facilitate local food systems assessments: Using a scoping review approach. *Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development*, *13*(1). <https://doi.org/10.5304/jafscd.2023.131.008>
- Bellante, L., Carney, M. A., & Owen, G. (2022). Leveraging university resources to build awareness, support regional food policy, and disrupt dominant narratives guiding food-based development: Examples from the University of Arizona’s Center for Regional Food Studies. *Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development*, *11*(3), 9–11. <https://doi.org/10.5304/jafscd.2022.113.017>
- Calancie, L., Stritzinger, N., Konich, J., Horton, C., Allen, N. E., Ng, S. W., Weiner, B. J., & Ammerman, A. S. (2017). Food policy council case study describing cross-sector collaboration for food system change in a rural setting. *Progress in Community Health*

- Partnerships: Research, Education, and Action*, 11(4), 441–447.
<https://doi.org/10.1353/cpr.2017.0051>
- Clark, J. K., & Inwood, S. M. (2016). Scaling-up regional fruit and vegetable distribution: potential for adaptive change in the food system. *Agriculture and Human Values*, 33(3), 503–519.
<https://doi.org/10.1007/s10460-015-9618-7>
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). Collaborative governance regimes. In *Collaborative Governance Regimes*. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84943385460&partnerID=40&md5=64cf5f6e580b7f4ad7cd67e2789d5f7c>
- Farnsworth, L. D. (2017). BEYOND POLICY: Race, Class, Leadership and Agenda-Setting in North American Food Policy Councils. *International Issues in Adult Education*, 23, 55–71.
<https://www.scopus.com/pages/publications/105006751404?origin=resultlist>
- Fears, R., Abdullah, K. A. B., Canales-Holzeis, C., Caussy, D., Haines, A., Harper, S. L., McNeil, J. N., Mogwitz, J., & ter Meulen, V. (2021). Evidence-informed policy for tackling adverse climate change effects on health: Linking regional and global assessments of science to catalyse action. *PLoS Medicine*, 18(7), 1–12. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003719>
- Godrich, S. L., Doe, J., Goodwin, S., Stoneham, M., & Devine, A. (2025). Lived Experience of Regional and Remote Food Systems: Barriers to and Enablers of Food Access in Western Australia. *Health Promotion Journal of Australia*, 36(2). <https://doi.org/10.1002/hpja.70002>
- Godrich, S. L., Goodwin, S., Doe, J., Stoneham, M., & Devine, A. (2025). Shaping Effective Food Action Groups: Participant Perspectives on Structure and Stakeholder Involvement in Regional and Remote Western Australia. *Health Promotion Journal of Australia*, 36(2). <https://doi.org/10.1002/hpja.70013>
- Keegan, S., Reis, K., Roiko, A., & Desha, C. (2024). Exploring resilience concepts and strategies within regional food systems: a systematic literature review. *Food Security*, 16(3), 801–825.
<https://doi.org/10.1007/s12571-023-01418-9>
- Lim, S. (2023). 217Parties and Party Systems. In J. Han, R. Pacheco Pardo, & Y. Cho (Eds.), *The Oxford Handbook of South Korean Politics* (p. 0). Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780192894045.013.14>
- Mangnus, A. C., Vervoort, J. M., McGreevy, S. R., Ota, K., Rupperecht, C. D. D., Oga, M., & Kobayashi, M. (2019). New pathways for governing food system transformations: A pluralistic practice-based futures approach using visioning, back-casting, and serious gaming. *Ecology and Society*, 24(4). <https://doi.org/10.5751/ES-11014-240402>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Prové, C., de Krom, M. P. M. M., & Dessein, J. (2019). Politics of scale in urban agriculture governance: A transatlantic comparison of food policy councils. *Journal of Rural Studies*, 68, 171–181. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.01.018>
- Sadler, R. C., Arku, G., & Gilliland, J. A. (2015). Local food networks as catalysts for food policy change to improve health and build the economy. *Local Environment*, 20(9), 1103–1121.
<https://doi.org/10.1080/13549839.2014.894965>
- Schiff, R., Levkoe, C. Z., & Wilkinson, A. (2022). Food Policy Councils: A 20—Year Scoping Review (1999–2019). *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 6.
<https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.868995>
- Schiller-Merkens, S., & Degens, P. (2024). Organizing for social transformation from below: Prefigurative organizing and civic action. In *The Handbook of Organizing Economic, Ecological and Societal Transformation*. <https://doi.org/10.1515/9783110986945-012>
- Schiller-Merkens, S., & Machin, A. (2023). Knowing Food: Sustainability Politics, Food Policy Councils and the Co-Production of Knowledge. *International Journal of Politics, Culture*

- and Society*, 36(3), 311–328. <https://doi.org/10.1007/s10767-023-09446-1>
- Schmidt Rivera, X., Rodgers, B., Odanye, T., Jalil-Vega, F., & Farmer, J. (2023). The role of aeroponic container farms in sustainable food systems – The environmental credentials. *Science of The Total Environment*, 860, 160420. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.160420>
- Shalom, T., Dayan, T., & Feitelson, E. (2025). Public sector involvement in non-state governances for sustainable food systems—a biodiversity perspective. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 9. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2025.1489266>
- Steyaert, A., Kuyper, T., Dessein, J., & Prové, C. (2025). Urban food policy councils as politicized spaces: The case of Arusha, Tanzania. *Food Policy*, 131. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2025.102802>
- Thompson, D., Johnson, K. R., Cistrunk, K. M., Vancil-Leap, A., Nyatta, T., Hossfeld, L., Rico Méndez, G., & Jones, C. (2020). Assemblage, food justice, and intersectionality in rural Mississippi: the Oktibbeha Food Policy Council. *Sociological Spectrum*, 40(6), 381–399. <https://doi.org/10.1080/02732173.2020.1801541>
- Zollinger, R., & Owen, G. (2026). Nourishing connections: An arts-informed approach to illuminating community food values. *Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development*, 15(2), 1–19. <https://doi.org/10.5304/jafscd.2026.152.011>



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).